

**ANALISIS PENERAPAN BATAS MINIMUM PIDANA PELATIHAN
KERJA MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2012
PADA PUTUSAN NOMOR20/PID.SUS-ANAK/2020/PN Tpg.**

Oleh

Deva Silvia Anggraini

NIM 180574201025

Abstrak

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg hakim memutuskan terdakwa tidak sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini mengetahui penerapan batas minimum pidana pelatihan kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode penelitian ini adalah Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber data lainnya. Objek penelitian ini tedapat di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang yang berfokus pada kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg. Penelitian ini bersumber pada Undang-undang yang relevan dengan penelitian terdahulu serta sumber lainnya. Penelitian ini memuat hasil berupa Hakim adalah seorang yang memutuskan suatu perkara sehingga memiliki pertimbangan maupun kebebasan dalam hal memutuskan perkara baik itu dalam sanksi pidana pelatihan kerja yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku namun dalam penelitian ini hakim tidak memutuskan batas minimum pidana pelatihan kerja yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 78 Ayat 2 yang seharusnya dipidana dengan minimal 3 (tiga) bulan. Kesimpulannya adalah hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. dalam memutus putusan.

Kata Kunci : Penerapan, Batas Minimum, Sanksi Pidana, Pelatihan Kerja

**ANALYSIS OF APPLICATION OF MINIMUM CRIMINAL LIMITS FOR
WORK TRAINING ACCORDING TO LAWNUMBER 11 OF 2012 IN
DECISION NUMBER 20/PID. SUS-ANAK/2020/PN Tpg .**

By
Deva Silvia Anggraini
NIM 180574201025

Abstract

Court decision number 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg the judge did not release the defendant's verdict as stated by Law Number 11 of 2012 on Child Judicature. Thus, the purpose of this research is to discover the implementation of the minimum limit for work traineeship according to Law Number 11 of 2012 on Child Judicature. This research is using Normative Law method by examining library materials or other data sources. The object of this research is in the Tanjungpinang District Court which focuses on the case of Court Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg. This research is based on laws that are relevant to previous research and other sources. The results of this research is, a judge is a figure who decides a verdict out of a case so that he has consideration and freedom in terms of stating a verdict both in terms of criminal penalty for work traineeship according to the applicable law, but in this study the judge did not state the verdict on the minimum limit for work traineeship which is clearly stipulated in Law Number 11 of 2012 Article 78 Paragraph 2 which should be sentenced to a minimum of 3 (three) months. In conclusion, judges shall not impose sentences that are lower than the minimum limit and also judges shall not impose sentences higher than the maximum sentence that has been stated by law.

Keywords: *Implementation, Minimum Limits, Criminal Sanctions, Job Training*